BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini tuntutan masyarakat semakin meningkat atas pemerintahan yang baik. Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus ditingkatkan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Di mana laporan keuangan yang dihasilkan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Kadek Desiana Wati, 2014).

Permasalahan mengenai kualitas laporan keuangan kini semakin hangat untuk diperbincangkan, banyaknya kasus-kasus buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menjadi isu hangat yang perlu dikaji lebih dalam. Hal ini merupakan bukti dari kurangnya pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan buruknya sistem pengendalian internal, serta kurangnya kompetensi yang dimiliki staf akuntansi sehingga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Permasalahan ini dibuktikan dengan diperolehnya opini disclaimer dibeberapa instansi pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Opini disclaimer diberikan terhadap laporan keuangan karena Badan Pengawas Keuangan mengalami

kesulitan dalam menerapkan prosedur audit pada beberapa pos yang disajikan (Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti, 2014).

Rendahnya kualitas laporan keuangan, secara umum disebabkan penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi standar akuntansi pemerintahan, penyelenggaraan sistem pengendalian internal yang belum memadai dan kurangnya kompetensi staf akuntansi yang ada (Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti, 2014).

Laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik, tidak terlepas dari penerapan sistem pengendalian internal yang baik.Melalui penguatan sistem pengendalian internal, diharapkan upaya perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah lebih dipacu agar kedepannya dapat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.Sebab laporan keuangan yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian berarti laporan tersebut dapat dipercaya sebagai alat pengambil keputusan oleh para pemakai laporan keuangan.Selain itu penerapan sistem pengendalian internal dapat mencegah adanya suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektifitas, dan dapat mencegah kerugian Negara (Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti, 2014).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat tercermin dari hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdapat selisih antara saldo piutang denda sewa tanah dan bangunan berdasarkan perhitungan mutasi dan saldo di neraca, kondisi tersebut mengakibatkan penyajian nilai Piutang Sewa Tanah atau Bangunan dan Denda Sewa Tanah atau Bangunan

dalam Neraca per 31 Desember 2014 belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan belum dapat diverifikasi keberadaannya serta tidak diyakini keandalan dalam penyajian laporan keuangannya (Emmy Mutiarini, 2015).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dinyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu, sistem pengendalian intern dalam laporan keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang sangat penting untuk di perhatikan, sehingga dapat mencapai efisiensi, efektivitas, dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara demi kepentingan masyarakat dan daerah. Pengendalian intern ini menjadi sangat penting karena sistem akuntansi sebagai sistem informasi merupakan subjek terjadinya kesalahan baik yang disengaja mau pun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk menyakinkan para stakeholder maupun publik tentang keakuratan laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah dibutuhkan sistem pengendalian intern yang optimal (Karmila, 2012).

Hal ini sesuai dengan fenomena yang terjadi menurut Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Barat menyatakan bahwa pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung yaitu lemahnya sistem pengendalian intern yang disebabkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak optimal dalam melaksanakan pengendalian atas pengelolaan sewa tanah dan bangunan dan Kepala Bidang Pemberdayaan Aset

DPKAD dan Kepala Seksi Pemanfaatan Aset Daerah belum melakukan inventarisasi dan validasi secara memadai atas aset yang disewakan serta data penyewa dan perjanjian sewa.yang mengakibatkan terdapat selisih antara saldo piutang denda sewa tanah dan bangunan berdasarkan perhitungan mutasi dan saldo di neraca (Emmy Mutiarini, 2015).

Informasi dalam bentuk laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah, akan sangat diperlukan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan berbagai pihak. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai atau dengan kata lain, bahwa informasi harus mempunyai nilai (Suwardjono 2005).

Informasi akan bermanfaat apabila memenuhi karakteristik kualitatif (qualitative characteristics). Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat, telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bagian Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, terdiri dari: 1) relevan, 2) andal, 3) dapat dibandingkan dan 4) dapat dipahami (Erma Setiawati, 2014).

Perkembangan teknologi informasi meliputi perkembangan infrastruktur TI, seperti *hardware, software,* teknologi penyimpanan data (*storage*). Perkembangan Teknologi informasi tidak hanya mempengaruhi dunia bisnis, tetapi juga bidang-bidang lain, seperti kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain. Perkembangan teknologi informasi, terutama pada era informasi berdampak signifikan terhadap sistem informasi akuntansi (SIA) . Dampak yang

dirasakan secara nyata adalah pemrosesan data yang mengalami perubahan dari sistem manual ke sistem komputer. Di samping itu, pengendalian intern dalam SIA serta peningkatan jumlah dan kualitas informasi dalam pelaporan keuangan juga akan terpengaruh. Perkembangan akuntansi yang menyangkut SIA berbasis komputer dalam menghasilkan laporan keuangan akan mempengaruhi praktik pengauditan. (Naniek Noviari,2011).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat tercermin dari hasil pemeriksaan BPK (Ifa Ratifah, 2012:30). Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan (Ifa Ratifah, 2012:30). Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP) (Liza rahayu dkk, 2014). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan tidak terdapat kondisi atau keadaan tertentu yang memerlukan bahasa penjelas (Bastian 2006:87). Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum dan berdampak material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan (Bastian 2006:87). Opini Tidak Wajar (TW) yaitu laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum (Bastian 2006:87). Opini Tidak Memberi Pendapatan (TMP) yaitu penyimpangan yang material dan prinsip akuntansi yang berlaku umum (Bastian 2006:87).

Tabel 1.1
Opini pemeriksaan laporan keuangan

Jenis LK	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
LKPP	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%	1
LKKL	64	74%	19	22%	0	0%	3	4%	86
LKPD	153	34%	276	60%	9	2%	18*)	4%	457
LK Badan Lainnya	9	60%	5 **)	33%	0	0%	1	7%	15

*) termasuk LK Kabupaten Kepulauan Aru TA 2012 yang diperiksa pada Tahun 2014
**) termasuk LK Perum PTN Tahun 2011 dan 2012 yang diperiksa pada Tahun 2014

Sumber : IHPS I Tahun 2014 BPK RI

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Liza rahayu dkk, 2014). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas (Liza rahayu dkk, 2014). Terhadap 456 LKPD Tahun 2013, Ketua BPK RI mengatakan bahwa BPK memberikan opini WTP atas 153 LKPD, opini WDP atas 276 LKPD, opini TW atas 9 LKPD, dan opini TMP atas 18 LKPD **(**Harry Azhar Azis**,** 2014 dalam Indra Arief Pribadi, 2014).

Tabel 1.2
Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013	
12	Prov. Jawa Barat												
	LKPD			27		27		27		27		27	
	1	164	Prov. Jawa Barat	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	165	Kab. Bandung	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	TMP
	3	166	Kab. Bandung Barat	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	167	Kab. Bekasi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	168	Kab. Bogor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

Sumber: IHPS I Tahun 2014 BPK RI

Pemerintah daerah memiliki masalah dalam pencatatan aset tanah. "Aset tanah masih banyak yang belum bersertifikat," (Arman Syifa, 2016 dalam Tempo.co 2016) .Di tempat yang sama, Wali Kota Bandung, tidak terlalu kecewa dengan raihan opini WDP dari BPK. Menurut dia, masih banyak yang perlu dibenahi terutama masalah pencatatan aset. "Masalahnya masih di aset dan sudah ada progres cuma belum bisa dihitung tahun ini,"(Ridwan Kamil 2016 dalam Tempo.co 2016). Lebih lanjut Ridwan menjelaskan banyak aset Pemerintah Kota Bandung yang berasal dari peninggalan jaman kolonial Belanda digugat oleh warga. "Sebagai kota peninggalan Belanda, setahun lebih dari 15 kali digugat ke pengadilan urusan aset. Untuk menghitung kembali aset-aset peninggalan Belanda, Ridwan Kamil mengaku akan melakukan survei ulang menggunakan software khusus. "Tim aset dibentuk, sudah bikin software aset baru untuk menghitung sehingga kita akan survey ulang dari nol sehingga kita akan tahun aset-aset yang memang datanya kurang kita tidak hitung lagi. Kemarin warisan Belanda dihitung ternyata sertifikat tidak ada, lokasi dikuasai pihak ketiga, jadi tercatat di Pemkot tapi tidak diakui BPK karena keberadaannya tidak diyakini."

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di lapangan menurut Ahmad Rosana selaku pegawai bagian aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diketahui bahwa yang berkaitan dengan teknologi informasi yang digunakan, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Keuangan Kota Bandung masih belum mengoptimalkan teknologi informasi yang paling terbaru dalam hal perangkat keras sehingga mengakibatkan kurang mendukungnya terhadap kualitas laporan keuangan yang tepat waktu sesuai periode akuntansi (Ahmad Rosana, 2016).

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dalam penjelasan PP No. 56 Tahun 2005 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Terwujudnya kualitas laporan keuangan akan menjadi landasan awal bagi tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan segala pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari dana masyarakat akan berjalan lancar seiring kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan Negara. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, penulis memandang penting untuk melakukan penelitian yang dituangkan dengan penelitian **"Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung)."**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dilatar belakang penelitian, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1) Kualitas Penyajian laporan keuangan yang tidak diyakini keandalannya.
2) Sistem pengendalian Intern dalam penyajian laporan keuangan masih lemah.

3) belum mengoptimalkan teknologi informasi yang paling terbaru dalam hal perangkat keras

1.3 Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1 Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

2 Seberapa besar pengaruh pemanfaatan Teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Penelitian dimaksudkan untuk mencari kebenaran atas pengaruh sistem pengendalian intern dan pemanfaatan Teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dengan menggunakan data yang diperoleh dan uji empiris, guna memecahkan masalah.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

3 Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian sudah selayaknya memiliki kegunaan baik untuk penulis maupun pihak lain yang memerlukan. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1.1.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi, bahkan rujukan dan referensi bagi pengembangan konsep tentang bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. Berdasarkan konsep kerangka berpikir yang telah dibangun, masalah pada kualitas laporan keuangan dapat diperbaiki dengan meningkatkan sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga akan menjadi lebih baik dan sesuai yang diharapkan.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan yang pernah di pelajari, melengkapi hasil-hasil penelitian

sebelumnya mengenai sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah, serta referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengadakan kajian lebih lanjut dalam topik yang sama.